

Kontinuitas Ideologi *Developmentalisme* dalam Pemberitaan PSN PIK 2 di *Detik.com*

Sultan Rafly Dharmawan

Program Studi Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Penulis Korespondensi: sultan22006@mail.unpad.ac.id

Abstract. *This study examines the continuity of the ideology of developmentalism in post-Reformasi Indonesian online media discourse, using the case of the coverage of the Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) National Strategic Project (PSN) on Detik.com. Developmentalist thinking has never completely disappeared since the end of the New Order era to the present day (Adiprasetyo, 2025; Romano, 1999). Therefore, this study empirically tests this thesis using Fairclough's (1995) three-dimensional model of Critical Discourse Analysis (CDA), Gramsci's (1971) theory of hegemony, and the media political economy frameworks of Tapsell (2017) and Hadiz & Robison (2005). Six news articles from Detik.com published between August 2023 and December 2024 were analysed qualitatively. The findings reveal three patterns of ideological continuity: (1) the construction of the PSN as an indisputable national interest that replicates the logic of the 'Pancasila Press'; (2) the delegitimisation of affected citizens as obstacles to progress, which echoes the 'threat to stability' mechanism of the New Order era; and (3) a shift in hegemonic mechanisms from direct state repression towards structural bias in media conglomerate ownership. This study argues that within Indonesia's post-Reform media oligarchy ecosystem (Tapsell, 2017), developmentalist hegemony operates through the internalisation of the boundaries of the produced discourse. A mechanism is at work that, in its effects, is equivalent to New Order-era censorship but leaves no visible traces of coercion.*

Keywords: *Critical Discourse Analysis; Detik.com; Developmentalism; Economy-Politics Media; Hegemony.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji kontinuitas ideologi *developmentalisme* dalam wacana media daring Indonesia pasca-Reformasi, dengan mengambil kasus pemberitaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) di Detik.com. Pemikiran *developmentalis* tidak pernah sepenuhnya lepas pasca-Orde Baru hingga sekarang (Adiprasetyo, 2025; Romano, 1999). Oleh karena itu, penelitian ini menguji tesis tersebut secara empiris melalui Analisis Wacana Kritis (AWK) model tiga dimensi Fairclough (1995), teori hegemoni Gramsci (1971), dan kerangka ekonomi-politik media Tapsell (2017) dan Hadiz & Robison (2005). Enam teks berita Detik.com periode Agustus 2023–Desember 2024 dianalisis secara kualitatif. Temuan menunjukkan tiga pola kontinuitas ideologis: (1) konstruksi PSN sebagai kepentingan nasional tak terbantahkan yang mereplikasi logika Pancasila Press; (2) delegitimasi warga terdampak sebagai penghambat kemajuan yang mengulang mekanisme 'pengancam stabilitas' era Orde Baru; dan (3) pergeseran mekanisme hegemoni dari represi negara langsung menuju structural bias kepemilikan konglomerat media. Penelitian ini berargumen bahwa dalam ekosistem media oligarki Indonesia pasca-Reformasi (Tapsell, 2017), hegemoni *developmentalisme* beroperasi melalui internalisasi batas-batas wacana yang diproduksi. Terjadi sebuah mekanisme yang secara hasil setara dengan sensor Orde Baru namun tidak meninggalkan jejak koersi yang kasat mata.

Kata Kunci: Analisis Wacana Kritis; Detik.com; *Developmentalisme*; Ekonomi-Politik Media; Hegemoni.

1. LATAR BELAKANG

Pada Maret 2024, pemerintah Indonesia menetapkan kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) di pesisir utara Tangerang sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi Rp65 triliun. Narasi yang mengiringi penetapan tersebut terasa akrab: pembangunan demi kepentingan nasional, pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan tertinggi, dan modernisasi infrastruktur sebagai penanda kemajuan bangsa (Limanseto, 2024). Keakraban ini bukan kebetulan. Ia merupakan gema dari formasi ideologis yang telah mengakar jauh sebelum era

digital: developmentalisme sebagai doktrin yang selama puluhan tahun menyamakan pembangunan fisik dengan kemajuan nasional.

Meskipun Pancasila Press secara legal dilikuidasi melalui UU Pers No. 40 Tahun 1999, Adiprasetio (2025) menegaskan bahwa "elements of the developmentalist mindset have continued to influence journalistic norms and state communication practices in the Reformasi era" (hlm. 338). Argumen serupa pernah dikemukakan Romano (1999) dua dekade lebih awal, yang menunjukkan bahwa jurnalisme pembangunan di Indonesia memiliki akar institusional yang tidak mudah dieliminasi hanya dengan perubahan regulasi. Pertanyaan yang kemudian mendesak adalah: jika ideologi itu tidak lenyap, bagaimana ia kini beroperasi dalam ekosistem media daring yang secara formal bebas dari kontrol negara langsung?

Kasus pemberitaan PIK 2 di Detik.com menawarkan lahan uji yang ideal untuk pertanyaan tersebut karena tiga alasan yang saling memperkuat. Pertama, Detik.com merupakan portal berita dengan trafik tertinggi di Indonesia, rata-rata 171–182 juta kunjungan per bulan yang menjadikannya arena paling signifikan dalam pembentukan wacana publik nasional (Ahrefs, 2025; Similarweb, 2025). Kedua, PIK 2 adalah salah satu PSN kontroversial yang melibatkan aliansi dua konglomerat (Agung Sedayu Group dan Salim Group) dan menimbulkan dampak sosial nyata bagi komunitas pesisir: nelayan kehilangan akses laut akibat reklamasi, petani tambak terhimpit ekspansi komersial, dan warga menghadapi relokasi dengan kompensasi di bawah nilai pasar (Rasunnah et al., 2024; Hasrul, 2025). Ketiga, Detik.com berada di bawah CT Corp, sebuah konglomerasi yang, seperti yang akan diargumentasikan penelitian ini, merupakan bagian dari ekosistem oligarki kapital yang sama dengan jaringan pengembang PSN (Tapsell, 2017).

Secara teoretis, penelitian ini berargumen bahwa developmentalisme pasca-Reformasi tidak memerlukan apparatus represi negara ala Orde Baru untuk mereproduksi dirinya. Sebaliknya, ia bekerja melalui mekanisme yang lebih halus yaitu hegemoni. Dalam pengertian Gramsci (1971), di mana kepentingan kelas dominan direproduksi sebagai common sense; ekonomi-politik media oligarki yang didokumentasikan Tapsell (2017) dan Hadiz & Robison (2005), yang menunjukkan bagaimana jaringan kapital Orde Baru berhasil merekonfigurasi dirinya dalam bentuk konglomerasi media demokratis. Dalam bukunya berjudul *the will to improve*, Li (2007), menunjukkan bagaimana tata kelola pembangunan secara inheren mereproduksi marginalisasi terhadap populasi yang ditarget untuk diperbaiki.

Penelitian ini mengisi persimpangan antara dua arus kajian yang selama ini berjalan paralel: kajian historis tentang jurnalisme pembangunan Indonesia (Adiprasetio, 2025; Romano, 1999; Waisbord, 2009) dan kajian kontemporer tentang representasi media dalam

konteks konflik pembangunan PSN (Lenga et al., 2024; Prayoga et al., 2025). Kontribusinya adalah menghubungkan kedua arus tersebut melalui argumen bahwa pola-pola representasi yang ditemukan dalam pemberitaan PIK 2, merupakan manifestasi kontemporer dari formasi ideologis dengan genealogi panjang yang kini beroperasi melalui struktur kapital.

2. KAJIAN TEORITIS

Genealogi Jurnalisme Pembangunan Indonesia

Jurnalisme pembangunan sebagai konsep lahir pasca-Perang Dunia II dalam konteks dekolonisasi Asia, Afrika, dan Amerika Latin, yang dipengaruhi kuat oleh geopolitik Perang Dingin dan teori modernisasi Barat (Waisbord, 2009). Di Indonesia, konsep ini mengambil bentuk yang distingtif dan lebih ekstrem: Pancasila Press, yang tidak sekadar meliput aktivitas pembangunan tetapi secara aktif "aimed at creating a favorable image of the government, presenting it as the guardian of national progress" (Adiprasetyo, 2025, hlm. 327).

Adiprasetyo (2025) menelusuri bagaimana developmentalisme di bawah Orde Baru merupakan bentuk ideologis yang dibangun di atas konfluensi teori modernisasi Rostow, geopolitik Perang Dingin, dan legitimasi rezim Suharto. Di bawah kerangka ini, pembangunan ekonomi dikonstruksi sebagai setara dengan kemajuan nasional, dan setiap kritik terhadap program pembangunan otomatis dicap sebagai ancaman stabilitas. Instrumen institusionalnya bervariasi dari SIUPP, KOPKAMTIB, hingga Dewan Pers yang berfungsi sebagai quasi-governmental institution untuk menyelaraskan media dengan kepentingan negara.

Romano (1999) telah menandai ketegangan yang tidak terselesaikan antara definisi negara dan definisi praktisi tentang jurnalisme pembangunan di Indonesia. Di era kontemporer, Adiprasetyo (2025) berargumen bahwa meskipun Pancasila Press secara hukum dilikuidasi pasca-1998, "elements of the developmentalist mindset have continued to influence journalistic norms and state communication practices in the Reformasi era", Namun, ketegangan ini tidak hilang pasca-Reformasi. Terlihat bertransformasi konteksnya, dari tekanan negara ke tekanan pasar dan kepemilikan korporat.

Waisbord (2009) memberikan konteks komparatif: dalam berbagai konteks Global South, development journalism menciptakan ambiguitas definitif tentang 'kepentingan nasional' yang mendorong self-censorship jurnalis pada isu-isu yang dianggap sensitif. Di Indonesia, ambiguitas ini telah terlembagakan selama tiga dekade Orde Baru dan meresap ke dalam habitus profesional jurnalisme bahkan setelah restriksi formal dicabut (Tapsell, 2012). Dalam konteks ini, narasi PSN PIK 2 dapat dibaca sebagai aktualisasi kontemporer dari logika

yang sama: pembangunan infrastruktur yang diklaim sebagai kepentingan nasional yang melampaui kritik.

Ekonomi Politik Media Oligarki Indonesia Pasca-Reformasi

Untuk memahami mengapa narasi developmentalisme tetap dominan dalam media daring Indonesia, analisis ekonomi-politik media menjadi sangat penting. Tapsell (2017) mendokumentasikan bagaimana era pasca-Reformasi menghasilkan konsentrasi kepemilikan pada delapan konglomerat media yang ia sebut sebagai media oligopoli. Para pemilik ini tidak menggunakan perusahaan media mereka untuk mengejar ambisi politik atau secara eksplisit mendukung kepentingan figur politik atau partai yang mereka afiliasikan.

Argumen ini terhubung langsung dengan analisis Hadiz dan Robison (2005) yang menunjukkan bahwa reformasi neo-liberal dan demokratisasi di Indonesia tidak menghasilkan sistem baru yang bersih dari oligarki. Sebaliknya, "market reforms have been resisted and even hijacked to consolidate predatory state and private oligarchies" (Hadiz & Robison, 2005, hlm. 220). Dengan kata lain, jaringan kapital yang sama yang beroperasi di bawah Orde Baru berhasil merekonfigurasi dirinya dalam institusi-institusi demokrasi baru, termasuk industri media.

Dalam konteks ini, posisi CT Corp selaku pemilik konglomerasi Detik.com, perlu dipahami bukan sebagai aktor isolat tetapi sebagai bagian dari ekosistem oligarki. Relasi kapital antara CT Corp dan jaringan pengembang properti berskala nasional mencerminkan pola umum konglomerasi Indonesia di mana kepemilikan media beririsan dengan kepentingan bisnis lintas sektor. Bagdikian (2004) menunjukkan bahwa dalam kondisi seperti ini, independensi redaksi dapat terancam melalui internalisasi oleh wartawan dan editor tentang batas-batas yang tidak sebaiknya dilanggar.

Argumen ini mendapat dukungan empiris dari studi Tapsell (2012) tentang self-censorship dalam jurnalisme Indonesia pasca-Reformasi. Tapsell menemukan bahwa self-censorship tetap menjadi praktik dominan meskipun tekanannya bergeser dari aparatus negara ke tekanan korporat dan pasar. Jurnalis tidak menginternalisasi batasan karena adanya ancaman penjara seperti di era Orde Baru, namun karena pemahaman implisit tentang kepentingan organisasi media yang menggaji mereka.

Hegemoni, Wacana, dan Konstruksi Common Sense Pembangunan

Gramsci (1971) membedakan antara dua bentuk dominasi: domination melalui koersi aparatus negara, dan hegemony melalui kepemimpinan kultural-moral yang beroperasi lewat konsensus. Ia berargumen bahwa kapitalisme yang stabil bergantung terutama pada mekanisme

kedua: kemampuan kelas dominan untuk menjadikan pandangan dunia dan kepentingannya tampak sebagai common sense yang alamiah, universal, dan tidak dapat dipersoalkan.

Konsep intelektual organik Gramsci (1971) sangat relevan dalam konteks ini. Wartawan dan editor media korporat dapat dipahami sebagai intelektual organik kelas pemilik modal yang, terlepas dari intensi subjektif individual mereka, secara fungsional berkontribusi pada reproduksi pandangan dunia kelas tersebut melalui pilihan-pilihan representasional. Mereka tidak perlu mendapat instruksi eksplisit, cukup dengan internalisasi batas-batas wacana yang dapat diproduksi adalah mekanisme yang lebih efektif dan tidak meninggalkan jejak koersi.

Williams (1977) disini digunakan dalam mengembangkan analisis Gramsci dengan konsep elemen residual, dominan, dan emergent dalam formasi kultural. Elemen residual adalah praktik dan nilai dari formasi masa lalu yang masih aktif dalam proses kultural saat ini. Dalam kerangka ini, developmentalisme Orde Baru dapat dipahami sebagai elemen residual yang tetap aktif dalam formasi kultural media Indonesia kontemporer, karena telah tersedimentasi dalam habitus profesional jurnanisme selama lebih dari tiga dekade.

Habermas (1991) memberikan dimensi normatif yang komplementer: dalam kondisi pseudo-public sphere yang lahir dari komersialisasi media dan konsentrasi kepemilikan, media lebih banyak berfungsi sebagai instrumen manajemen persepsi publik bagi kepentingan dominan daripada sebagai arena diskursus yang sebenar-benarnya demokratis. Kondisi ini relevan untuk memahami bagaimana pemberitaan PIK 2 dapat secara sistematis mengabaikan perspektif warga terdampak tanpa ada mekanisme akuntabilitas formal yang efektif.

Marginalisasi Diskursif dan Representasi Kelompok Rentan

Van Dijk (1991) menunjukkan bahwa kelompok-kelompok yang termarginalisasi secara sosial cenderung direpresentasikan dalam cara yang menaturalisasikan subordinasi mereka dan menutup kemungkinan pembaca untuk memahami kondisi struktural yang melatarbelakangi perlawanan mereka. Dalam studinya tentang representasi minoritas etnis di pers Eropa, van Dijk mengidentifikasi pola ingroup/outgroup di mana kelompok dominan digambarkan secara positif dan detail sementara kelompok subordinat digambarkan secara negatif dan general. Pola ini berlaku lintas konteks dan lintas tipe marginalisasi, termasuk marginalisasi berbasis kelas dan ruang yang terjadi dalam konflik pembangunan.

Tuchman (1978) memperkenalkan konsep symbolic annihilation untuk mendeskripsikan kondisi di mana penghilangan atau pengurangan makna kelompok tertentu dalam representasi media berfungsi sebagai mekanisme pelestarian tatanan sosial. Dalam konflik pembangunan, symbolic annihilation beroperasi ketika pengalaman ketidakadilan struktural yang dialami

warga terdampak seperti: kehilangan lahan, relokasi paksa, kerusakan lingkungan, absen dari narasi media atau hanya hadir secara fragmentaris tanpa konteks yang memadai.

Li (2007) menambahkan dimensi *governmentality* pada analisis ini. Dalam kajiannya tentang program pembangunan di Indonesia, Li dalam *the will to improve* (2007) menunjukkan bahwa hasrat untuk memperbaiki kehidupan populasi tertentu melalui intervensi pembangunan secara inheren mereproduksi mekanisme pengucilan. Populasi yang dianggap perlu diperbaiki (dalam kasus PIK 2: warga pesisir yang dianggap perlu direlokasi demi kemajuan) menjadi sebatas objek kebijakan dan bukan subjek yang berpartisipasi dalam pendefinisian masa depan mereka sendiri. Media yang mereproduksi logika ini tanpa mempersoalkannya berkontribusi pada apa yang Li (2007) sebut sebagai *rendering technical*, sebuah proses mengabaikan dari diagram mereka proses-proses yang memiskinkan orang, dan justru fokus pada perilaku orang miskin.

Fairclough (1995) menyediakan kerangka untuk menganalisis bagaimana ketiga dimensi ini: hegemoni, ekonomi-politik media, dan marginalisasi diskursif, berartikulasi dalam teks berita konkret. Model tiga dimensinya (teks, praktik diskursif, praktik sosiokultural) memungkinkan analisis yang bergerak dari pilihan kata dan struktur kalimat menuju konteks institusional dan ideologis yang membentuk pilihan-pilihan tersebut. Dalam penelitian ini, model ini berfungsi sebagai kerangka integratif yang menghubungkan argumen genealogis Adiprasetyo (2025) dengan data empiris teks berita.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis. Paradigma kritis memposisikan peneliti sebagai agen yang secara sadar berpihak pada kelompok yang terpinggirkan, dan memandang realitas sebagai produk dari proses historis dan kekuatan-kekuatan sosial yang beroperasi secara tidak kasat mata (Hidayat, 2002; Eriyanto, 2001). Pemilihan paradigma ini konsisten dengan sifat pertanyaan penelitian 'bagaimana dan mengapa hal itu terjadi dalam kondisi struktural tertentu'.

Metode yang digunakan adalah Analisis Wacana Kritis (AWK) model tiga dimensi Fairclough (1989, 1995), yang dalam penelitian ini dioperasionalkan melalui dua dari tiga dimensinya: (1) analisis teks, berfokus pada pilihan leksikal, konstruksi partisipan, dan pola representasi dalam teks berita; dan (2) analisis sosiokultural, yang menghubungkan temuan tekstual dengan konteks historis-ideologis *developmentalisme* yang diidentifikasi melalui kajian literatur. Dimensi praktik diskursif (level menengah) disinggung secara konseptual berdasarkan data sekunder yang tersedia tentang rutinitas dan struktur organisasi Detik.com.

Objek penelitian terdiri dari enam teks berita Detik.com yang diterbitkan antara 1 Agustus 2023 hingga 31 Desember 2024. Periode ini dipilih berdasarkan data platform *Mediacloud* yang menunjukkan dua lonjakan diskursus PIK 2: pertama pada Agustus 2023 (isu tembok pembatas) dan kedua pada November–Desember 2024 (insiden kecelakaan truk dan pencabutan status PSN). Dari 74 berita yang teridentifikasi melalui penelusuran sistematis, dilakukan reduksi melalui eksklusi berita tidak relevan dan *purposive sampling* berdasarkan kriteria representativitas isu, saturasi data, dan pergeseran wacana, menghasilkan enam berita final (lihat Tabel 1).

Tabel 1. Korpus Teks Berita Detik.com tentang PIK 2 (Agustus 2023–Desember 2024).

No.	Judul Berita	Tanggal	Orientasi Wacana
1	19 Truk Dirusak Warga Buntut Bocah Terlindas di Tangerang	08/11/2024	Kriminalisasi perlawanan warga
2	Duduk Perkara Warga Ricuh hingga Bakar Truk di Tangerang	08/11/2024	Narasi ketertiban vs. kerusuhan
3	Gara-gara Tembok Tinggi PIK 2, Warga 3 Desa Kehilangan Pekerjaan	08/08/2023	Dampak ekonomi, korban tanpa struktur
4	Warga Tuding PIK 2 Bebaskan Lahan PSN dengan Harga Murah	13/05/2024	Sengketa lahan, suara warga reaktif
5	Kawasan Tropis Masa Depan yang Inklusif	10/12/2024	Legitimasi proyek oleh pengembang
6	Melihat Lebih Dekat Proyek Strategis Nasional di Utara Jakarta	11/12/2024	Framing PSN sebagai kepentingan nasional

Sumber: Detik.com (2023–2024), diolah peneliti.

Analisis dilakukan melalui pembacaan berlapis. Pertama, pembacaan deskriptif untuk memetakan pilihan leksikal, pola konstruksi partisipan (siapa yang menjadi subjek aktif dan siapa yang diposisikan sebagai objek), serta distribusi ruang naratif antar aktor. Kedua, pembacaan interpretatif untuk mengidentifikasi strategi-strategi wacana: framing, omission, presupposisi, dan intertekstualitas. Ketiga, pembacaan eksplanatif yang menghubungkan temuan tekstual dengan konteks historis-ideologis menggunakan kerangka Fairclough (1995), Gramsci (1971), van Dijk (1991), Li (2007), dan argumen genealogis Adiprasetyo (2025).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontinuitas Pertama: Pembangunan sebagai Common Sense Tak Terbantahkan

Pola paling konsisten dalam korpus adalah konstruksi PSN PIK 2 sebagai entitas yang melampaui kritik. Teks-teks dalam kategori 'Legitimasi proyek' (berita 5) dan 'Framing PSN' (berita 6) secara sistematis menggunakan kosakata yang menempatkan proyek dalam bingkai kepentingan nasional: 'proyek strategis', 'pertumbuhan ekonomi', 'penciptaan lapangan kerja',

'kawasan inklusif', 'investasi nasional'. Kosakata ini menjadi apa yang disebut Fairclough (1992) sebagai naturalisasi. Proses di mana konstruksi ideologis dipresentasikan sebagai fakta yang tidak memerlukan justifikasi.

Mekanisme ini identik dengan yang diidentifikasi Adiprasetyo (2025) dalam Pancasila Press, di mana *"the New Order positioned development as a guiding principle"* dan setiap kebijakan ekonomi diklaim *"made in the national interest and based on objective and universal economic criteria"* (hlm. 378–379). Dalam pemberitaan PIK 2, label 'PSN' berfungsi persis seperti label 'Pancasila' dulu: memberikan legitimasi nasional yang membuat persoalan proyek menjadi sesuatu yang tidak perlu dipertanyakan keabsahannya. Gramsci (1971) menyebut kondisi ini sebagai *common sense*. Asumsi-asumsi yang tersedimentasi sedemikian dalam sehingga tampak sebagai kenyataan alami.

Indikator paling kuat adalah apa yang absen dalam teks. Tidak ada satu pun berita dalam korpus yang mempertanyakan mengapa kawasan properti swasta bernilai komersial tinggi dapat dikategorikan sebagai 'strategis nasional'. Tidak ada analisis tentang implikasi hukum pemberian fasilitas PSN kepada konsorsium konglomerat. Tidak ada pertanyaan tentang siapa yang secara faktual diuntungkan dan siapa yang menanggung biaya sosial-ekologis dari proyek tersebut. Absensi ini, dalam kerangka Fairclough (1995), merupakan konstruksi aktif yang menutup kemungkinan pertanyaan-pertanyaan tersebut masuk ke dalam ranah wacana publik. Van Dijk (1991) menyebut strategi ini sebagai *positive self-presentation* dari kelompok dominan, yaitu menonjolkan hal-hal yang menguntungkan dan menyembunyikan hal-hal yang melemahkan.

Kontinuitas Kedua: Delegitimasi Warga menjadi 'Pengancam Stabilitas'

Pola kedua yang juga menunjukkan signifikansi adalah cara berita-berita kategori 'Kriminalisasi perlawanan' dan 'Narasi ketertiban' (berita 1 dan 2) merepresentasikan warga terdampak. Analisis leksikal menunjukkan dominasi kosakata destruktif yang menempatkan warga sebagai pelaku: 'merusak', 'membakar', 'mengamuk', 'ricuh', 'massa anarkis'. Pilihan kata ini secara konsisten membangun citra warga sebagai ancaman terhadap ketertiban dan iklim investasi, bukan sebagai korban ketidakadilan struktural yang mencapai titik ledak setelah bertahun-tahun frustrasi terakumulasi.

Paralel dengan Pancasila Press sangat eksplisit di sini. Adiprasetyo (2025) mendokumentasikan bagaimana di bawah Orde Baru, Admiral Sudomo dari KOPKAMTIB menyatakan bahwa pers harus menghindari berita yang dapat *"mengganggu ketertiban"*, dan setiap kritik terhadap program pembangunan dikategorikan sebagai ancaman *"stabilitas nasional"*. Dalam pemberitaan PIK 2, logika yang sama beroperasi dengan leksikon yang

diperbarui: bukan "*mengganggu stabilitas*" tetapi "*mengancam iklim investasi*"; bukan "*subversif*" tetapi "*anarkis*". Objek yang dilindungi bergeser dari stabilitas Orde Baru ke kondusivitas investasi PSN, namun mekanisme diskursif delegitimasi tetap identik.

Poin analitis krusial adalah ketiadaan konteks struktural dalam narasi. Berita-berita tersebut tidak menghadirkan fakta bahwa NJOP tanah di wilayah terdampak turun sepihak dari Rp100.000 menjadi Rp48.000 per meter persegi pasca-penetapan PSN, sebuah manipulasi kebijakan yang secara sistematis merugikan warga dalam proses ganti rugi (Rasunnah et al., 2024). Pembakaran truk yang dinarasikan sebagai tindakan 'anarkis' tidak diletakkan dalam konteks sebagai respons terhadap frustrasi bertahun-tahun yang tidak mendapat respons melalui saluran formal. Tuchman (1978) menyebut penghilangan konteks struktural ini sebagai *symbolic annihilation*: warga hadir secara fisik dalam teks, tetapi pengalaman ketidakadilan struktural mereka, yang merupakan elemen yang penting untuk dipahami, justru dimusnahkan secara simbolis.

Li (2007) memberikan dimensi penjelas yang lebih dalam, warga yang menolak untuk direlokasi demi proyek pembangunan dikonstruksi sebagai irasional karena mereka menolak 'perbaikan' yang sudah direncanakan oleh para ahli. Perlawanan mereka tidak bisa diakui sebagai tindakan politik yang sah karena dalam kerangka *governmentality* pembangunan, mereka hanyalah objek yang perlu diperbaiki, bukan subjek yang berhak mendefinisikan sendiri apa yang mereka butuhkan. Media yang mereproduksi logika ini, menggambarkan perlawanan warga sebagai 'kerusuhan' alih-alih sebagai *contested politics*.

Kontinuitas Ketiga: Pergeseran Mekanisme Hegemoni

Temuan ketiga yang secara konseptual paling orisinal dalam penelitian ini adalah argumen tentang transformasi mekanisme operasi hegemoni *developmentalisme*. Adiprasetyo (2025) mendokumentasikan bahwa Pancasila Press beroperasi melalui represi negara yang langsung dan kasat mata: SIUPP, KOPKAMTIB, dan ancaman penutupan. Mekanisme ini efektif tetapi kasar dan dapat diidentifikasi sebagai koersi. Setelah Reformasi, mekanisme ini tidak dapat lagi digunakan secara terbuka tanpa biaya legitimasi yang tidak terjangkau.

Saat ini, yang menggantikannya, berdasarkan temuan penelitian ini dan sejalan dengan argumen Tapsell (2017) dan Hadiz & Robison (2005), adalah *structural bias* yang bersumber dari ekosistem kepemilikan media oligarki. Tapsell (2017) menunjukkan bahwa sebagian besar pemilik media Indonesia adalah bagian dari jaringan oligarki yang menggunakan media untuk kepentingan politik dan bisnis mereka. Dalam konteks ini, Detik.com di bawah CT Corp bukan merupakan bagian dari jaringan kapital yang sama dengan ekosistem konglomerasi pengembang dan investor yang menjadi benefisiari utama dari proyek PSN.

Mekanisme yang bekerja, sebagaimana dijelaskan McChesney (2000) dan Bagdikian (2004) dan dikonfirmasi secara empiris oleh Tapsell (2012) di Indonesia, tidak melalui instruksi editorial secara eksplisit. Wartawan tidak diperintahkan untuk tidak meliput ketidakadilan yang dialami warga PIK 2. Mekanisme yang bekerja adalah internalisasi: para jurnalis menginternalisasi apa yang Bourdieu (1996) sebut sebagai *doxa*, seperangkat asumsi yang diterima begitu saja sebagai hal yang alamiah tentang batas-batas wacana yang dapat diproduksi dalam organisasi media mereka. Hasilnya identik dengan sensor Orde Baru dalam hal dampaknya terhadap representasi warga marginal, namun proses produksinya tidak meninggalkan jejak koersi yang kasat mata.

Tabel 2 merangkum perbandingan mekanisme ini secara analitis:

Tabel 2. Transformasi Mekanisme Hegemoni Developmentalisme: Orde Baru vs. Era PSN.

Dimensi	Era Pancasila Press (Orde Baru)	Era PSN (Pasca-Reformasi)
Fondasi Legitimasi	Pancasila + ideologi pembangunan nasional	PSN + 'kepentingan investasi nasional'
Mekanisme Kontrol	SIUPP, KOPKAMTIB, sensor langsung, ancaman penutupan	Struktur kepemilikan oligarki, self-censorship, internalisasi batas wacana
Framing Perlawanan Warga	'Pengancam stabilitas nasional', 'subversif'	'Penghambat investasi', 'anarkis', 'perusuh'
Konteks Struktural dalam Berita	Ditiadakan secara eksplisit oleh regulasi	Ditiadakan melalui omission dan naturalisasi
Sumber Tekanan pada Jurnalis	Aparatus negara (koersi eksternal-kasat mata)	Kepemilikan korporat & ekosistem oligarki (struktural-tidak kasat mata)
Akuntabilitas	Dapat diidentifikasi sebagai sensor	Tidak kasat mata, terlembagakan sebagai 'profesionalisme'

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan Adiprasetyo (2025), Gramsci (1971), Tapsell (2012, 2017), Hadiz & Robison (2005), McChesney (2000).

Temuan ini menunjukkan bahwa legitimasi demokratis formal pasca-Reformasi tidak secara otomatis menghasilkan media yang lebih adil dalam merepresentasikan kelompok marginal. Seperti yang diargumentasikan Hadiz & Robison (2005), demokratisasi di Indonesia memungkinkan oligarki untuk beroperasi dan bahkan mengkonsolidasikan kekuasaannya dalam institusi-institusi demokrasi baru. Industri media adalah salah satu institusi tersebut. Dalam kondisi ini, memvalidasi temuan Williams (1977) tentang elemen residual dari formasi ideologis lama, tetap aktif dalam formasi dominan yang baru, namun kali ini tanpa jejak koersi yang dapat ditunjuk dan dilawan secara legal.

Pseudo-Public Sphere dan Krisis Fungsi Normatif Media

Habermas (1991) memandang ruang publik yang fungsional sebagai prasyarat demokrasi: sebuah arena di mana semua warga, tanpa memandang status sosial-ekonomi, memiliki kesempatan setara untuk berpartisipasi dalam diskursus publik. Namun, Habermas (1991) sendiri mengakui bahwa komersialisasi dan konsentrasi kepemilikan media telah mentransformasi ruang publik ideal ini menjadi *pseudo-public sphere*, yaitu sebuah ruang yang secara penampilan menyerupai forum diskursus terbuka, namun sesungguhnya didominasi oleh kepentingan komersial dan politis yang menyaring informasi dan membatasi rentang pandangan yang beredar.

Pemberitaan PIK 2 di Detik.com adalah manifestasi nyata dari fenomena ini. Sebagai portal berita dengan jangkauan terbesar di Indonesia, Detik.com secara formal membuka akses informasi kepada puluhan juta pembaca. Namun, seperti yang ditunjukkan temuan penelitian ini, informasi yang disirkulasikan secara sistematis menguntungkan narasi pengembang dan pemerintah serta mendelegitimasi narasi warga terdampak. Warga yang secara faktual menanggung biaya sosial-ekologis terbesar dari proyek justru paling minim mendapat representasi yang bermartabat.

Kondisi ini mempertegas relevansi argumen Kovach & Rosenstiel (2001) tentang fungsi normatif jurnalisme: pers seharusnya berfungsi sebagai *voice of the voiceless*, memberikan suara kepada mereka yang tidak memiliki akses terhadap arena kekuasaan formal. Dalam kasus PIK 2, fungsi ini secara aktif diinversi. Detik.com menjadi *amplifier* bagi mereka yang sudah memiliki suara paling keras yaitu negara dan konglomerasi, sembari meredam dan mendistorsi suara mereka yang paling membutuhkan representasi media.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mendemonstrasikan bahwa hegemoni developmentalisme dalam media Indonesia tidak berakhir bersama Pancasila Press. Ia bertransformasi secara mekanistik. Dari luar, ia nampak kehilangan hukumnya, namun didalam, logika intinya tetap bertahan. Ia beroperasi melalui tiga lapis yang saling memperkuat: common sense pembangunan nasional yang tak terbantahkan pada level wacana; struktural bias kepemilikan media oligarki pada level institusional; dan self-censorship yang terinternalisasi pada level individual jurnalis.

Dalam pemberitaan PIK 2 di Detik.com, tiga pola kontinuitas terdokumentasi: narasi PSN sebagai kepentingan nasional yang mereplikasi logika Pancasila Press; delegitimasi warga terdampak yang mengulang mekanisme 'pengancam stabilitas' dengan leksikon yang diperbarui; dan pergeseran mekanisme hegemoni dari represi negara kasat mata ke struktural

bias kepemilikan konglomerat yang tidak meninggalkan jejak koersi. Ketiga pola ini tidak berdiri sendiri; mereka berartikulasi dalam ekosistem media oligarki pasca-Reformasi yang didokumentasikan Tapsell (2017) dan Hadiz & Robison (2005), di mana rekonfigurasi jaringan kapital Orde Baru ke dalam institusi-institusi demokrasi baru menciptakan kondisi yang secara struktural merugikan representasi kelompok marginal.

Kontribusi teoretis penelitian ini adalah menghubungkan genealogi historis jurnanisme pembangunan Indonesia (Adiprasetyo, 2025; Romano, 1999) dengan manifestasi kontemporer yang dapat dianalisis secara empiris dalam teks berita, melalui kerangka yang mengintegrasikan AWK Fairclough (1995), hegemoni Gramsci (1971), ekonomi-politik media Tapsell (2017), dan analisis governmentality Li (2007). Implikasi praktisnya: reformasi jurnanisme Indonesia yang sungguh-sungguh memutus warisan Pancasila Press memerlukan lebih dari kebebasan formal dari sensor negara. Ia memerlukan transformasi struktural ekosistem kepemilikan media dan kesadaran kritis jurnalis terhadap bagaimana ideologi developmentalisme beroperasi pada level rutinitas profesional yang tampak teknis namun sesungguhnya sarat ideologis.

Keterbatasan penelitian ini mencakup belum diperolehnya data wawancara langsung dengan jurnalis Detik.com yang dapat memperkuat analisis pada level praktik diskursif, serta keterbatasan korpus pada enam teks berita yang, meski dipilih secara purposif, belum dapat merepresentasikan keseluruhan dinamika pemberitaan selama periode yang panjang. Studi lanjutan disarankan untuk mengembangkan analisis komparatif lintas portal berita Indonesia guna memetakan apakah pola yang ditemukan bersifat spesifik pada Detik.com atau merupakan fenomena struktural dalam ekosistem media daring Indonesia secara lebih luas.

DAFTAR REFERENSI

- Adiprasetyo, J. (2025). Genealogy of Indonesian developmental journalism: The Pancasila Press during authoritarian New Order (1966–1998). *Media History*, 31(3), 327–346. <https://doi.org/10.1080/13688804.2025.2502615>
- Bagdikian, B. H. (2004). *The New Media Monopoly*. Beacon Press.
- Bourdieu, P. (1996). *The Rules of Art: Genesis and Structure of the Literary Field*. Stanford University Press.
- Eriyanto. (2001). *Analisis Wacana: Pengantar analisis teks media*. LKiS.
- Eriyanto. (2008). *Analisis Framing: Konstruksi, ideologi, dan politik media*. LKiS.
- Fairclough, N. (1989). *Language and Power*. Longman.
- Fairclough, N. (1992). *Discourse and Social Change*. Polity Press.
- Fairclough, N. (1995). *Media Discourse*. Edward Arnold.

- Fauzan, U. (2015). Analisis wacana kritis dari model Fairclough hingga Mills. Pustaka Pelajar.
- Gramsci, A. (1971). Selections from the Prison Notebooks (Q. Hoare & G. N. Smith, Eds.). International Publishers.
- Habermas, J. (1991). The Structural Transformation of the Public Sphere: An inquiry into a category of bourgeois society. MIT Press.
- Hadiz, V. R., & Robison, R. (2005). Neo-liberal reforms and illiberal consolidations: The Indonesian paradox. *The Journal of Development Studies*, 41(2), 220–241. <https://doi.org/10.1080/0022038042000309223>
- Hasrul, M. (2025). Dampak Proyek Strategis Nasional PIK 2 terhadap kehidupan sosial masyarakat pesisir. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 12(1), 45–62.
- Hidayat, D. N. (2002). Metodologi penelitian dalam sebuah 'Multi-Paradigm Science'. *Mediator*, 3(2), 197–219.
- Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2001). The Elements of Journalism. Crown Publishers.
- Kriyantono, R. (2006). Teknis Praktis Riset Komunikasi. Kencana Prenada Media Group.
- Lenga, K. M., et al. (2024). Konflik lahan di Rempang dalam pandangan Analisis Wacana Kritis model Michel Foucault. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 22(1), 78–96.
- Li, T. M. (2007). The Will to Improve: Governmentality, development, and the practice of politics. Duke University Press.
- Limanseto, H. (2024). Kawasan Tropical Coastland PIK 2 resmi jadi PSN. Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
- McChesney, R. W. (2000). Rich Media, Poor Democracy: Communication politics in dubious times. New Press.
- Prayoga, et al. (2025). Representasi konflik PSN dalam pemberitaan media daring Indonesia: Kajian awal. *Jurnal Komunikasi Massa*, 18(1), 33–51.
- Rasunnah, et al. (2024). Analisis dampak sosial reklamasi dan PSN PIK 2. *Jurnal Agraria dan Tata Ruang*, 11(2), 201–219.
- Romano, A. (1999). Development journalism: State versus practitioner perspectives in Indonesia. *Media Asia*, 26(4), 183–191. <https://doi.org/10.1080/01296612.1999.11726592>
- Shoemaker, P. J., & Reese, S. D. (2014). Mediating the Message in the 21st Century: A media sociology perspective (3rd ed.). Routledge.
- Tapsell, R. (2012). Old tricks in a new era: Self-censorship in Indonesian journalism. *Asian Studies Review*, 36(2), 227–245. <https://doi.org/10.1080/10357823.2012.685926>
- Tapsell, R. (2017). Media Power in Indonesia: Oligarchs, citizens and the digital revolution. Rowman & Littlefield International.
- Tuchman, G. (1978). Making News: A study in the construction of reality. Free Press.
- van Dijk, T. A. (1991). Racism and the Press. Routledge.
- Waisbord, S. (2009). Rethinking 'development' journalism. In S. Allan (Ed.), *The Routledge Companion to News and Journalism* (pp. 148–158). Routledge.
- Williams, R. (1977). Marxism and Literature. Oxford University Press.

Wodak, R., & Meyer, M. (Eds.). (2009). *Methods of Critical Discourse Analysis* (2nd ed.). Sage.